

# RAKSASA PENERIMA SUBSIDI

**B35 UNTUK SIAPA ?**



**FEBRUARI 2023**

# DAFTAR ISI

---

01	Kata Pengantar
02	Ringkasan
03	Pendahuluan
11	Lampiran
13	Referensi

# DAFTAR TABEL & GAMBAR

---

04	Tabel 1. Realiasi Belanja BPDPKS Tahun 2021
03	Gambar 1. Rata-rata Bulanan Harga Minyak Sawit Periode Januari 2018 – Februari 2022
06	Gambar 2. Pungutan Ekspor Januari 2019 hingga Desember 2021
07	Gambar 3. Pungutan Ekspor Sawit dan Produk Turunannya Menurut Pangsa Kelompok Korporasi
08	Gambar 4. Perbandingan Jumlah Subsidi Biodiesel Antar Kelompok Korporasi Setiap Tahun
09	Gambar 5. Perbandingan Jumlah Pungutan Eskpor dan Subsidi Biodiesel Selama Periode 2019 hingga September 2021
09	Gambar 6. Selisih Subsidi Biodiesel dan Pungutan Ekspor Sawit Januari 2019-September 2021 (Rp)

---

# KATA PENGANTAR



Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian total luas lahan sawit mencapai 16,38 juta hektar, sedangkan luas sawit rakyat 6,94 hektar. Data ini menunjukkan bahwa kelapa sawit menjadi komoditas unggulan yang sangat menjanjikan bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian bangsa Indonesia.

Olehnya itu, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana kelapa sawit maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan aturan, salah satunya melalui pembentukan Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang dimana salah satu tujuannya untuk mengumpulkan dana Pungutan Ekspor (PE) sawit dan produk turunan guna mendanai program biodisel.

Akan tetapi dalam praktek pengelolaan alokasi anggaran untuk pembiayaan subsidi biodiesel ditemukan ada banyak permasalahan. Berdasarkan data yang dipaparkan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan sawit raksasa, seperti Wilmar, Musi Mas, Sinar Mas, Royal Golden Eagle dan lain-lain lebih banyak menikmati.

Laporan ini diharapkan dapat membuka pengetahuan tentang praktik-praktik monopoli oleh perusahaan yang merugikan dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Bogor, Januari 2023

Serikat Petani Kelapa Sawit

# RINGKASAN

Pemerintah sudah memastikan bahwa B35 berjalan mulai akhir Januari 2023. Program ini meningkat dari sebelumnya yakni B30. Berbagai tantangan yang ada atas dampak dari peningkatan menjadi B35 sepertinya tidak pernah digubris oleh pemerintah. Begitupun halnya Industri biodiesel dengan tidak melakukan perbaikan tata kelola di akar rumput dengan petani. Ini menunjukkan, program ini hanya untuk mementingkan industri biodiesel yang bersekutu dekat dengan perusahaan-perusahaan sawit milik mereka sendiri dan perusahaan-perusahaan perkebunan pihak ketiga.

Berbagai peringatan tentunya telah muncul di beragam media, seperti masalah perubahan tata guna lahan yang menyebabkan emisi meningkat, masalah korupsi/kolusi dan masalah daya adaptasi mesin kendaraan terhadap program B35. Hal paling penting dari peringatan masyarakat sipil dan organisasi petani kelapa sawit adalah masalah sustainability. Isu utama dalam konteks ini adalah masalah produk hulu kelapa sawit yang kemudian ditampung secara mudah melalui pasar biodiesel dalam negeri. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana azas keberlanjutan terutama masalah perkebunan dari lahan yang memiliki konflik sosial dan deforestasi. Tentunya dorongan akan adanya standar keberlanjutan menjadi sangatlah penting.

Hal yang tidak terlupakan tentunya adalah masalah subsidi yang besar untuk industri biodiesel. Sebagaimana diketahui, bahwa subsidi tersebut diperoleh dari pungutan ekspor kelapa sawit. Namun yang perlu dilihat dalam konteks ini adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap industri biodiesel berdampak pada tergerusnya harga komoditas kelapa sawit di tingkat petani kecil. Sebab pungutan atas harga CPO (Crude Palm Oil), mempengaruhi harga CPO lokal yang menjadi referensi untuk merumuskan harga pembelian TBS petani.

Bagaimanapun klaim yang dilakukan oleh pemerintah terutama dalam konteks penghematan devisa negara namun korbannya adalah petani kelapa sawit.

Sehingga Serikat Petani Kelapa Sawit membuat laporan ini dengan studi ekonomi untuk melihat serta menjawab pertanyaan besar publik, siapa yang mendapatkan untung dari bisnis biodiesel ini?

Laporan ini memperlihatkan bahwa keuntungan industri biodiesel sangatlah besar. Ada beberapa perusahaan yang dipungut kecil namun mereka menikmati untung dari subsidi.

Terdapat dua kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan pungutan ekspor sawit yang dibayarkannya selama periode 2019-2021. Kelompok korporasi tersebut ialah Royal Golden Eagle dan KPN Corp. Kedua kelompok korporasi tersebut lebih banyak membayar pungutan ekspor daripada menerima subsidi biodiesel. Sementara kelompok korporasi lainnya menerima dana lebih besar melalui subsidi biodiesel daripada pungutan ekspor yang dibayarkan kelompok korporasi tersebut.

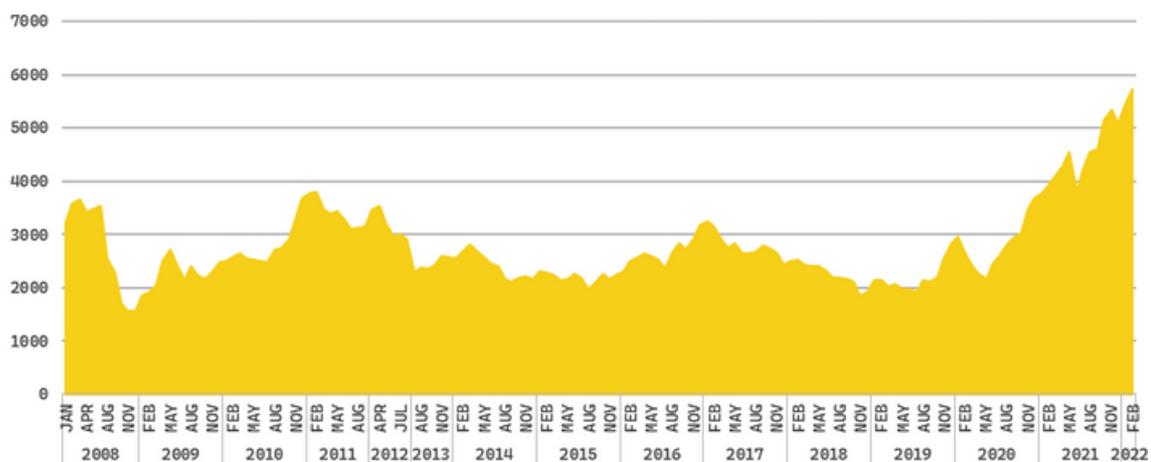
Dari dua belas kelompok korporasi penerima subsidi biodiesel pada periode 2019-2021. Wilmar merupakan kelompok korporasi yang paling diuntungkan dengan adanya skema subsidi biodiesel dari dana pungutan ekspor sawit dan produk turunannya. Wilmar mendapatkan subsidi biodiesel hampir tiga kali lipat dari jumlah pungutan ekspor yang dibayarkannya selama periode 2019-2021. Surplus yang diperoleh Wilmar mencapai Rp 14,42 triliun

Karena itu, laporan ini memiliki tujuan agar pemerintah membatalkan program B35 tersebut dan menghentikan subsidi untuk industri biodiesel. Kami memandang bahwa industri biodiesel memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri program tersebut tanpa disubsidi. Evaluasi itu dibutuhkan agar Pemerintah membuat roadmap nasional badan dana sawit untuk memperkuat perkebunan rakyat sebagai masa depan sawit Indonesia dan energi baru terbarukan yang bersih. Sehingga dengan demikian, petani yang buntung dapat lebih sejahtera.

# PENDAHULUAN

Pungutan ekspor (PE) produk sawit dan turunannya merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai instrumen untuk menghambat laju ekspor produk sawit dan turunannya dan untuk meningkatkan penerimaan negara (Syadullah, 2015). Meninjau ke belakang, kebijakan PE sawit juga diberlakukan ketika terjadi kenaikan harga minyak goreng dalam negeri tahun 1994-1995 yang berakhir dengan diberlakukannya PE sebesar 3% untuk mempertahankan pasokan sawit pada tingkat tertentu dalam memenuhi konsumsi dalam negeri (Putri et al, 2008).

Pada pertengahan November 2018, harga Crude Palm Oil (CPO) sempat mengalami titik terendahnya dalam 10 tahun terakhir kala itu (lihat Gambar 1). Hal ini disebabkan oleh tingginya stok minyak nabati global seperti CPO, minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, dan minyak rapeseed (Subiantoro, 2018; GAPKI, 2018; Petriella, Y., & Herlinda, W. D., 2018). Stok yang melimpah membuat harga minyak nabati global turun drastis.



**Gambar 1. Rata-rata Bulanan Harga Minyak Sawit Periode Januari 2018 – Februari 2022**  
(Sumber: Market Insider-2022, diolah)

Pemerintah Indonesia saat itu menyiapkan dua strategi untuk menahan laju penurunan harga, yakni dengan pengendalian dari sisi penawaran dan dari sisi permintaan. Dari sisi penawaran, pemerintah mengendalikan volume dan kualitas pasokan CPO dengan kebijakan seperti moratorium sawit, penyelesaian sawit dalam kawasan hutan (PPTKH), kebijakan sawit satu peta, penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), penyesuaian pungutan ekspor. Dari sisi permintaan, pemerintah mengendalikan harga lewat hilirisasi produk sawit dan optimalisasi kebijakan B20 (Ekarina, 2018; Febrian, 2022).

Salah satu kebijakan pemerintah untuk menyerap stok CPO yang melimpah kala itu adalah dengan mengoptimalkan konsumsi domestik, yakni hilirisasi minyak sawit dalam bentuk biodiesel. Dalam rangka mendukung terealisasinya program tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengumpulkan dana

pungutan ekspor sawit dan produk turunannya untuk mendanai program biodiesel. Subsidi produksi biodiesel tersebut diberikan untuk menutup gap ketika harga minyak nabati lebih mahal daripada harga minyak solar. Subsidi tersebut diberikan kepada korporasi produsen biodiesel yang telah diatur daftarnya melalui keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berikut dengan volume alokasi produksinya.

Pelembagaan pengumpulan dana pungutan ekspor sawit dan produk turunannya untuk pembiayaan program biodiesel tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Penerbitan Perpres itu kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS mengganti -

kan Peraturan Menteri ESDM No. 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2018. Peraturan-peraturan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar hukum dalam menetapkan badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel dan alokasi besaran volume untuk pe-ngadaan bahan bakar na-bati jenis biodiesel yang di-tetapkan melalui keputusan Menteri ESDM.

Mayoritas dana pungutan ekspor diberikan kepada korporasi produsen biodiesel. Padahal tujuan dihimpunnya dana tersebut sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Perpres No. 61 Tahun 2015 adalah untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, bukan untuk mengembangkan energi baru terbarukan.

Adanya persoalan penggunaan dana BPDPKS yang lebih banyak untuk pembiayaan subsidi biodiesel menimbulkan dugaan bahwa yang menikmati dana tersebut justru korporasi-korporasi besar produsen biodiesel (Supriyatna, 2022).

**Pada 2021, penggunaan dana BPDPKS untuk pembayaran selisih harga biodiesel mencapai 51 triliun atau 97,09% dari total realisasi belanja BPDPKS (lihat Tabel 1).**

Dengan latar belakang tersebut, diperlukan identifikasi kelompok korporasi mana saja yang telah membayar iuran pungutan ekspor dan yang telah menerima subsidi biodiesel berikut jumlahnya. Dari hasil tersebut juga perlu dibandingkan

jumlah iuran yang dibayarkan oleh suatu kelompok korporasi dengan subsidi biodiesel yang diterimanya. Sehingga dapat teridentifikasi kelompok-kelompok korporasi mana yang telah mendulang keuntungan dengan adanya subsidi biodiesel dalam konteks pungutan ekspor sawit dan produk turunannya

**Tabel 1. Realiasi Belanja BPDPKS Tahun 2021**

Kegiatan	Realisasi Belanja	Persentase
Beban Pembayaran Selisih Harga Biodiesel	51.951.617.007.640	97,09%
Beban Penyaluran Dana Riset	55.772.500.942	0,10%
Beban Promosi Kelapa Sawit	83.496.874.043	0,16%
Beban Pengembangan SDM Kelapa Sawit	64.559.840.897	0,12%
Beban Penyaluran Dana Peremajaan Kebun Kelapa Sawit	1.341.787.655.325	2,51%
Beban Sarana dan Prasarana	8.982.839.634	0,02%
Penghimpunan & Pengelolaan Dana	2.738.722.763	0,01%
<b>Total</b>	<b>53.508.955.441.244</b>	<b>100%</b>

(Sumber: Laporan Tahunan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2021, diolah.)

### Box 1. Data dan Metoda

- Data ekspor sawit dan produk turunannya yang digunakan adalah data transaksi ekspor mulai dari 2 Februari 2019 hingga 30 September 2021. Data tersebut berasal dari data kepabeanaan dengan kode Harmonized System (HS) 14049091, 15111000, 15119020, 15119031, 15119032, 15119036, 15119037, 15132110, 15132991, 15132994, 15132995, 23066010, 23066090, 38231920, 38231990, 15119039, 38260022, 15119049, 38231930, 15119041, 23069090, 38260090, 12071030, 12071010, 15132913, 38260021, 15119042, 14049092, 12071090, 12079990.
- Jumlah pungutan ekspor dihitung dengan mempertimbangkan peraturan tarif pungutan ekspor sawit dan produk turunannya, referensi harga CPO, dan kurs pajak Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah sesuai dengan tanggal transaksi ekspor (lihat lampiran 1 dan 2).
- Jumlah pungutan ekspor dihitung dengan menggunakan rumus  $PE = VE \times TPE \times Ex$ . Dimana PE adalah nilai pungutan ekspor dalam satuan Rupiah, VE adalah volume ekspor dalam satuan ton, TPE adalah tarif pungutan ekspor menurut kode HS tertentu dalam satuan Dollar Amerika Serikat, dan Ex adalah kurs pajak untuk mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah dalam satuan Rupiah.
- Data realisasi volume dan subsidi biodiesel yang dibayarkan tahun 2019 dan 2020 yang digunakan dalam kajian diambil dari laporan tahunan 2019 dan 2020 BPDPKS.
- Realisasi jumlah subsidi yang diterima oleh masing-masing kelompok korporasi dihitung dengan menggunakan rumus  $JS = VR \times SB$ . Dimana JS adalah jumlah subsidi yang diterima oleh produsen biodiesel dalam satuan Rupiah, VR adalah volume realisasi produksi biodiesel yang dihitung dengan rumus  $VR = VA \times FR$ , dimana VA adalah volume alokasi sesuai dengan keputusan menteri ESDM, FR adalah faktor realisasi yang dihasilkan dari penghitungan total alokasi / total realisasi di tahun t. Sementara SB adalah nilai subsidi per liter yang didapatkan dari rumus  $SB = RS / VB$ . Dimana RS adalah nilai total realisasi subsidi dalam satuan Rupiah dan VB adalah volume biodiesel yang dibayarkan subsidinya dalam satuan liter. Dari hasil penghitungan subsidi yang diterima oleh masing-masing korporasi tersebut kemudian dijumlahkan menurut kelompok korporasi.

### Pungutan Ekspor Sawit dan Produk Turunannya

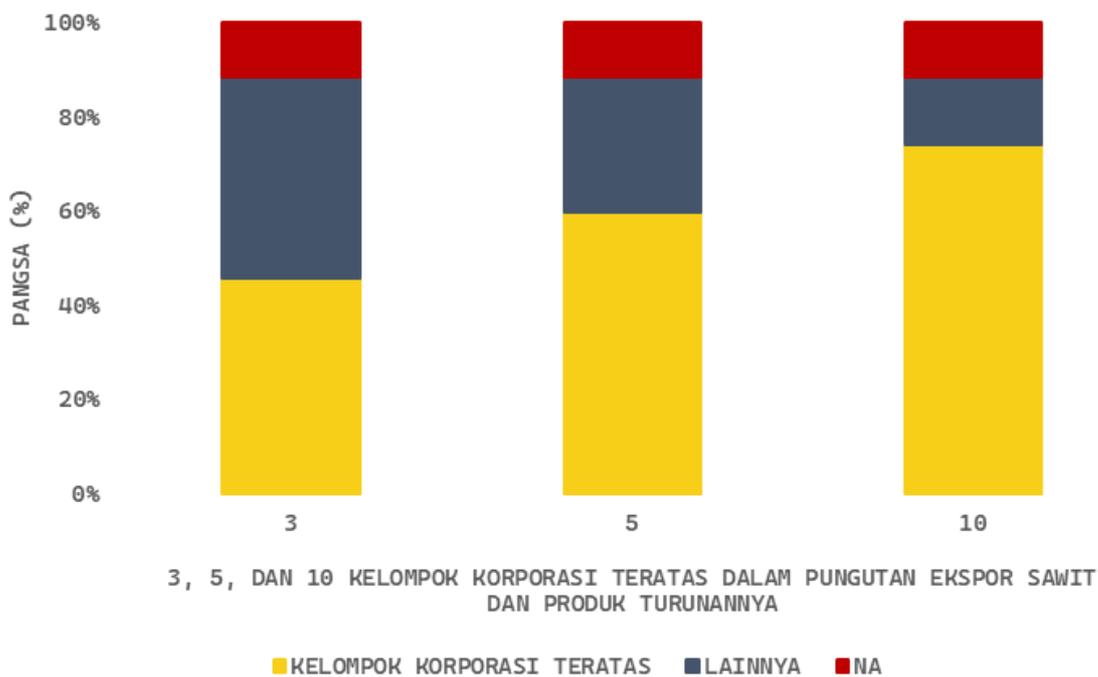
Hasil estimasi dengan data ekspor kepabeanaan untuk transaksi ekspor mulai dari 2 Februari 2019 hingga 30 September 2021 menunjukkan, jumlah penerimaan pungutan ekspor mencapai Rp70,99 triliun. Pungutan ekspor paling banyak didapatkan pada tahun 2021 dengan nilai mencapai Rp51,59 triliun. Nilai tersebut naik dari jumlah pungutan ekspor sebelumnya, yakni 2020 yang sebesar Rp19,4 triliun. Sementara pada 2019, sama sekali tidak ada pungutan ekspor karena kebijakan penghapusan pungutan ekspor dan harga referensi CPO yang berada di bawah harga minimal yang dikenakan pungutan ekspor. Rincian penghapusan dan ada tidaknya pungutan ekspor sesuai dengan harga referensi dan harga minimal yang dikenakan pungutan ekspor dapat dilihat pada Gambar 2.

	2019	2020	2021
JAN	Tidak ada pungutan ekspor (Harga di bawah 570 USD)	Ada pungutan ekspor	Ada pungutan ekspor
FEB	Tidak ada pungutan ekspor (Harga di bawah 570 USD)	Ada pungutan ekspor	Ada pungutan ekspor
MAR	Penghapusan Tarif (Per. Men Keu No.23/PMK.05/2019)	Ada pungutan ekspor	Ada pungutan ekspor
APR	Penghapusan Tarif (Per. Men Keu No.23/PMK.05/2019)	Ada pungutan ekspor	Ada pungutan ekspor
MEI	Penghapusan Tarif (Per. Men Keu No.23/PMK.05/2019)	Ada pungutan ekspor	Ada pungutan ekspor
JUN	Tidak ada pungutan ekspor (Harga di bawah 570 USD)	Ada pungutan ekspor	Ada pungutan ekspor
JUL	Penghapusan Tarif (Per. Men Keu No.136/PMK.05/2019)	Ada pungutan ekspor	Ada pungutan ekspor
AGU	Penghapusan Tarif (Per. Men Keu No.136/PMK.05/2019)	Ada pungutan ekspor	Ada pungutan ekspor
SEP	Penghapusan Tarif (Per. Men Keu No.136/PMK.05/2019)	Ada pungutan ekspor	Ada pungutan ekspor
OKT	Tidak ada pungutan ekspor (Harga di bawah 570 USD)	Ada pungutan ekspor	Ada pungutan ekspor
NOV	Tidak ada pungutan ekspor (Harga di bawah 570 USD)	Ada pungutan ekspor	Ada pungutan ekspor
DES	Tidak ada pungutan ekspor (Harga di bawah 570 USD)	Ada pungutan ekspor	Ada pungutan ekspor

**Gambar 2. Pungutan Ekspor Januari 2019 hingga Desember 2021**  
(Sumber: PMK 152/PMK.05/2018, PMK 23/PMK.05/2019, PMK 136/PMK.05/2019, PMK 57/PMK.05/2020, PMK 191/PMK.05/2020, PMK 76/PMK.05/2021, diolah.)

Selama periode 2 Februari 2019 hingga 30 September 2021 tercatat ekspor sawit dan produk turunannya mencapai 90.528 transaksi. Dengan jumlah dan nilai ekspor terbesar adalah produk Refined Bleached Deodorised Palm Olein (RBDPO) atau minyak goreng sebesar 24,18 juta ton dengan nilai transaksi mencapai 17,13 juta USD atau setara Rp256,93 triliun – asumsi nilai tukar Rp 15.000 per 1 USD.

Kelompok korporasi yang paling banyak dikenakan pungutan ekspor selama periode 2019-2021 adalah Royal Golden Eagle Rp14,54 triliun, Musim Mas Rp10,24 triliun, Wilmar Rp7,72 triliun, Sinar Mas Rp6,35 triliun, Permata Hijau Rp3,47 triliun, KPN Corp Rp2,41 triliun, Kuala Lumpur Kepong (KLK) Rp2,14 triliun, Astra Agro Lestari Rp 2,1triliun, Hayel Saeed Anam (HSA) Rp1,99 triliun, dan Louis Dreyfus Rp1,61 triliun. Jumlah pungutan ekspor dari sepuluh kelompok korporasi teratas tersebut berjumlah Rp52,57 triliun atau 74,04% dari seluruh pungutan ekspor selama periode tersebut (lihat Gambar 3).



**Gambar 3. Pungutan Ekspor Sawit dan Produk Turunannya Menurut Pangsa Kelompok Korporasi**

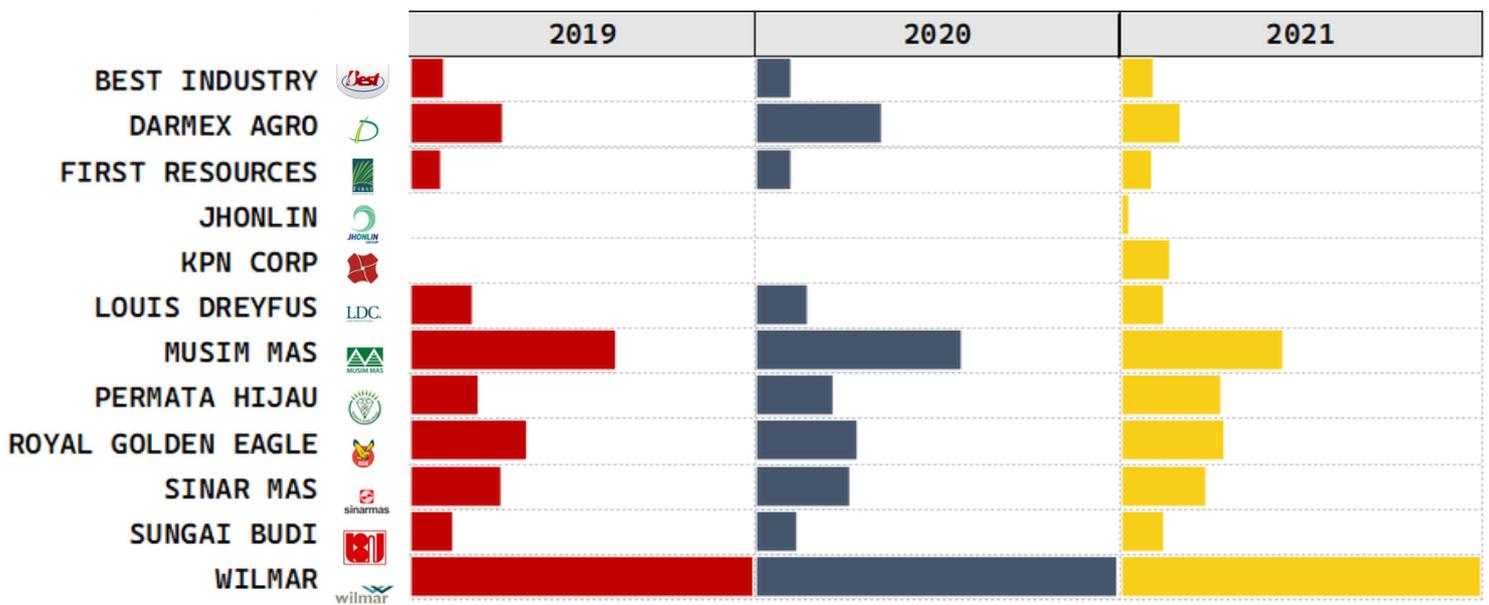
### Kelompok Korporasi Penerima Subsidi Biodiesel

Jumlah pemberian subsidi biodiesel selama Januari 2019 hingga September 2021 adalah Rp66,78 triliun. Dimana pada 2019 total pemberian subsidi mencapai Rp3,07 triliun, pada 2020 sebesar Rp28,01 triliun, dan pada 2021 sebesar Rp35,7 triliun.

Terdapat dua belas kelompok korporasi yang menikmati subsidi selisih harga minyak dan biodiesel tersebut, antara lain Best Industry, Darmex Agro, First Resources, Jhonlin, KPN Corp, Louis Dreyfus, Musim Mas, Permata Hijau, Royal Golden Eagle, Sinar Mas, Sungai Budi, dan Wilmar. Masing - masing kelompok

korporasi menerima jumlah subsidi yang berbeda-beda. Karena alokasi volume produksi biodiesel yang diberikan kepada masing-masing kelompok korporasi juga berbeda.

Berdasarkan Kepmen ESDM No. 15 K/10/MEM/2019, Kepmen ESDM No. 195 K/10/MEM/2020, dan Kepmen ESDM No. 149 K/EK.05/DJE/2021, jumlah alokasi biodiesel pada 2019, 2020, dan 2021 masing-masing adalah 6.614.766 kL, 9.547.506 kL, dan 9.413.032 kL. Selama periode 2019-2021 total alokasi biodiesel mencapai 25.575.304 kL, dengan alokasi paling besar dimiliki oleh Wilmar sebesar 8.394.173 kL atau 32,82% selama periode tersebut.



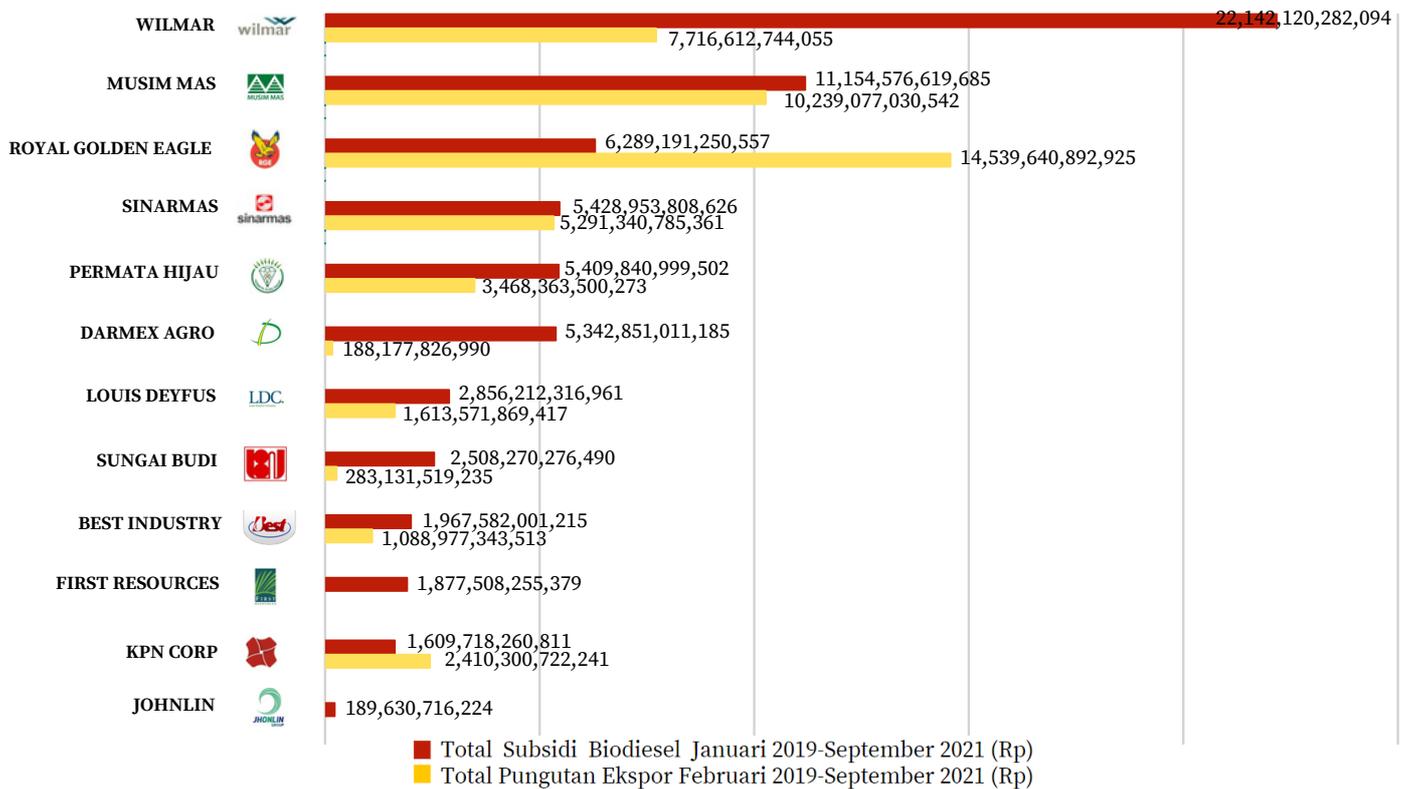
**Gambar 4. Perbandingan Jumlah Subsidi Biodiesel Antar Kelompok Korporasi Setiap Tahun**

Sejalan dengan jumlah alokasi yang diterima oleh masing-masing kelompok korporasi, jumlah subsidi yang diterima oleh masing-masing grup juga bervariasi (lihat Gambar 4). Wilmar sebagai kelompok korporasi dengan jumlah alokasi produksi biodiesel paling besar menerima subsidi terbesar diantara kelompok korporasi lain. Selama periode Januari 2019 hingga September 2021, jumlah subsidi yang

telah diterima oleh Wilmar mencapai Rp22,14 triliun. Jumlah tersebut dua kali lipat lebih besar dari jumlah subsidi yang diterima oleh Musim Mas, penerima subsidi terbesar kedua sebesar Rp11,15 triliun. Dan hampir empat kali lipat lebih besar dari penerima subsidi terbesar ketiga, yakni Royal Golden Eagle sebesar Rp6,29 triliun.

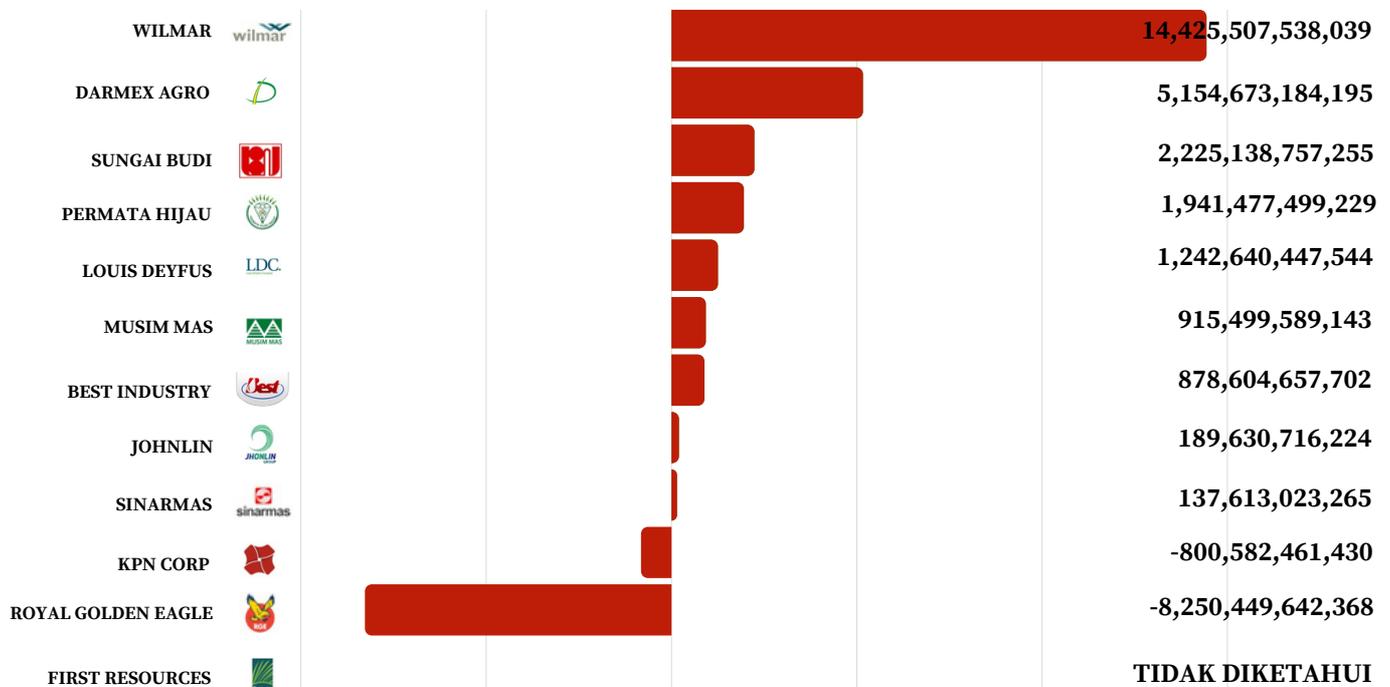
## WILMAR SURPLUS BESAR

Hampir seluruh kelompok korporasi mendapatkan keuntungan dari subsidi biodiesel dalam konteks pungutan ekspor. Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin. Sementara dua kelompok korporasi yang tidak untung adalah Royal Golden Eagle dan KPN Crop. dan satu tidak diketahui adalah First Resources, karena data transaksi ekspornya tidak diketahui (lihat Gambar 5 dan Gambar 6).



**Gambar 5. Perbandingan Jumlah Pungutan Ekspor dan Subsidi Biodiesel Selama Periode 2019 hingga September 2021**  
(Sumber: , diolah.)

\*Data transaksi ekspor perusahaan-perusahaan First Resources tidak diketahui



**Gambar 6. Selisih Subsidi Biodiesel dan Pungutan Ekspor Sawit Januari 2019-September 2021 (Rp)**  
(Sumber: , diolah.)

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Peraturan Tarif Pungutan Ekspor Sawit dan Produk Turunannya

NAMA PMK	MASA BERLAKU	KETERANGAN
152/PMK.05/2018	4 DESEMBER 2018 - 28 FEBRUARI 2019	KETENTUAN BARU MENGENAI ADANYA BATASAN 3 LAPISAN HARGA
23/PMK.05/2019	1 MARET 2019 - 31 MEI 2019	PENGHAPUSAN TARIF
23/PMK.05/2019	1 JUNI 2019 - 30 SEPTEMBER 2019	TARIF KEMBALI SEPERTI PADA 152/PMK.05/2018
136/PMK.05/2019	1 OKTOBER 2019 - 31 DESEMBER 2020	PENGHAPUSAN TARIF
136/PMK.05/2019	1 JANUARI 2020 - 9 DESEMBER 2020	TARIF KEMBALI SEPERTI 152/PMK.05/2018
57/PMK.05/2020	1 JUNI 2020 - 9 DESEMBER 2021	PENGHAPUSAN LAPISAN HARGA ATAU MENJADI TARIF TUNGGAL DAN PENINGKATAN TARIF SEBESAR 5 USD/TON UNTUK SETIAP PRODUK
191/PMK.05/2020	10 DESEMBER 2020 - 1 JULI 2021	PEMBERLAKUAN KEMBALI LAPISAN HARGA, TAPI DENGAN JUMLAH 15 LAPISAN HARGA DAN PEMBERLAKUAN TARIF YANG LEBIH PROGRESIF
76/PMK.05/2021	2 JULI 2021 - 17 MARET 2022	PENGURANGAN LAPISAN HARGA MENJADI 7 LAPISAN, DENGAN KENAIKAN BATAS BAWAH DAN ATAS

**Lampiran 2. Harga Referensi CPO sesuai Peraturan Menteri Perdagangan untuk  
Periode Januari 2019 – Desember 2021**

	2019	2020	2021
JAN	503,3	729,72	951,86
FEB	565,4	839,69	1026,78
MAR	595,98	786,63	1432,24
APR	568,12	653,76	1787,5
MEI	573,31	635,15	1110,68
JUN	547,17	568,94	1223,9
JUL	542,45	622,47	1094,15
AGU	532,3	656,98	1048,62
SEP	555,55	738,07	1185,26
OKT	574,86	768,98	1196,6
NOV	571,13	782,03	1283,38
DES	650,18	870,77	1365,99

# REFERENSI

- BPDPKS. (2022). Laporan Tahunan 2021. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
- Ekarina. (2018). Tahan Pelemahan Harga CPO, Pemerintah Siapkan Dua Strategi Kebijakan. Katadata. Diakses 20 Desember, 2022, dari <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a5599a040d/tahan-pelemahan-harga-cpo-pemerintah-siapkan-dua-strategi-kebijakan>.
- Febrian, R. (2022). Kelindan Permasalahan Minyak Goreng dalam Tata Niaga Sawit. Betahita.Id. Diakses 20 Desember 2022, dari <https://betahita.id/news/detail/7150/kelindan-permasalahan-minyak-goreng-dalam-tata-niaga-sawit.html>.
- GAPKI. (2018). Produksi Melimpah, Harga CPO Terpuruk. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). <https://gapki.id/news/6288/produksi-melimpah-harga-cpo-terpuruk>.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 K/10/MEM/2019
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 195 K/10/MEM/2020
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 149 K/EK.05/DJE/2021
- Markets Insider. (2022). Palm Oil PRICE Today | Palm Oil Spot Price Chart | Live Price of Palm Oil per Ounce | Markets Insider. [markets.businessinsider.com. https://markets.businessinsider.com/commodities/palm-oil-price/usd](https://markets.businessinsider.com/commodities/palm-oil-price/usd).
- Masitoh, S. (2021). Realisasi Belanja Negara Mencapai Rp 2.310,4 Triliun pada November 2021. [kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-belanja-negara-mencapai-rp-23104-triliun-pada-november-2021](https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-belanja-negara-mencapai-rp-23104-triliun-pada-november-2021)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2018
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2020
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2021
- Petriella, Y., & Herlinda, W. D. (2018). Daya Beli Negara Importir Masih Lesu, Ekspor CPO Indonesia Tertekan. [Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20181108/12/857855/daya-beli-negara-importir-masih-lesu-ekspor-cpo-indonesia-tertekan](https://ekonomi.bisnis.com/read/20181108/12/857855/daya-beli-negara-importir-masih-lesu-ekspor-cpo-indonesia-tertekan).

Piermartini, R. (2004). The role of export taxes in the field of primary commodities. *Research Papers in Economics*.

Putri, E. I. K., Widyastutik, W., Rifin, A., Hartoyo, S., Daryanto, H. (2008). Kebijakan Pungutan Ekspor Crude Palm Oil Kelapa Sawit: Perkembangan Dan Mekanisme Pemungutannya, *Jurnal Agribisnis Dan Ekonomi Pertanian*.  
<https://Journal.Ipb.Ac.Id/Index.Php/Jurnalagribisnis/Article/View/5989>.

Subiantoro, R. (2018). Nasib CPO RI: Stok Melimpah, Harga Hancur Lebur. *CNBC Indonesia*.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181122084723-4-43176/nasib-cpo-ri-stok-melimpah-harga-hancur-lebur>.

Supriyatna, I. (2022). Oligarki Mencengkram Proyek Biodiesel. *suara.com*.  
<https://www.suara.com/bisnis/2022/02/01/072546/oligarki-mencengkram-proyek-biodiesel?page=all>.

Syadullah, M. (2015). Impact Tax Policy on CPO Exports. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 18(3), 241–254. <https://doi.org/10.31685/kek.v18i3.34>



**SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT**

**2023**